Pesona Nusantara
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2026
Halaman: 61 - 71

Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Melalui Edukasi dan Pendampingan dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga di Nagari Pilubang, Kabupaten Padang Pariaman

Amanda Hendrilia Putri[1], Lusyiana Andhica[2], Andri Saputra[3], Annisa Fitri[4], Yulia Hanoselina[5]
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email Author: amandahendrilia@gmail.com[1*], lusianaandhica@gmail.com[2], andryysaputraa28@gmail.com[3], fitriannisa757@gmail.com[4], yuliahanoselina@fis.unp.ac.id[5]

Kata Kunci: *Program Keluarga Harapan, Edukasi, Pendampingan, Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat*

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Meskipun program ini telah berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman penerima manfaat mengenai mekanisme program, hak dan kewajiban peserta, serta masih tingginya ketergantungan terhadap bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan PKH melalui kegiatan edukasi dan pendampingan guna meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nagari Pilubang, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada tanggal 29 Maret hingga 4 April 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif serta penggunaan media visual yang komunikatif mampu meningkatkan pemahaman KPM mengenai konsep dasar PKH, hak dan kewajiban penerima manfaat, pengelolaan keuangan keluarga, serta pentingnya kemandirian ekonomi. Evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan setelah mengikuti sosialisasi. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong perubahan cara pandang KPM terhadap PKH, dari sekadar bantuan sosial menjadi sarana pemberdayaan menuju kemandirian. Temuan penelitian menegaskan bahwa edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan PKH dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Key Word: *Family Hope Program, Education, Mentoring, Family Welfare, Community Empowerment*

Abstrack

Program Keluarga Harapan (PKH) is one of the Indonesian government's social protection programs aimed at reducing poverty through conditional social assistance for poor and vulnerable families. Although the program has contributed to improving access to education and health services, its implementation at the local level still faces various challenges, including limited understanding among beneficiaries regarding program mechanisms, participants' rights and obligations, and the persistence of dependency on social assistance. This study aims to optimize the implementation of PKH through educational and mentoring activities to enhance the independence and welfare of Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) in Nagari Pilubang, Padang Pariaman Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation during the socialization activities conducted from March 29 to April 4, 2026. The findings indicate that educational and mentoring activities implemented through a participatory approach and supported by communicative visual media were effective in improving beneficiaries' understanding of the fundamental concepts of PKH, their rights and obligations, family financial management, and the importance of economic self-reliance. Evaluation results showed a significant increase in participants' understanding after attending the socialization program. Furthermore, the activities encouraged a shift in beneficiaries' perspectives, viewing PKH not merely as social assistance but as an empowerment instrument that supports the achievement of self-sufficiency. The study concludes that sustainable education and mentoring are essential factors in strengthening the effectiveness of PKH and promoting more sustainable community empowerment.

Copyright © 2026 Amanda Hendrilia Putri,dkk
*This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

*Corresponding author's e-mail: amandahendrilia@gmail.com

e-ISSN: 3089-798X

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang hingga kini masih menjadi tantangan utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat, tetapi juga berimplikasi langsung pada terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dasar. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun secara signifikan dari 6,18 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada Maret 2024, mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah yang terintegrasi dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2024 masih tercatat sebesar 24,06 juta orang atau setara 8,57 persen dari total populasi, dan pemerintah melalui RPJMN 2025-2029 menargetkan angka kemiskinan umum dapat ditekan hingga 4,5 persen serta kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2029. (Badan Pusat Statistik, 2024).

Di tingkat regional, Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi tantangan serupa meskipun telah mencatatkan perbaikan yang menggembirakan. Data BPS Sumatera Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 315,43 ribu jiwa atau 5,42 persen, turun dibandingkan periode Maret 2024 yang sebesar 345,73 ribu jiwa. Persentase kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, yakni 6,79 persen berbanding 4,16 persen pada periode yang sama. Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu wilayah perdesaan yang sebagian warganya masih tergolong dalam kategori keluarga miskin dan rentan, sehingga menjadi bagian dari sasaran program perlindungan sosial nasional, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025).

Sebagai respons konkret terhadap permasalahan kemiskinan, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH dirancang untuk membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak terhadap fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka, serta mendorong perubahan perilaku keluarga dalam jangka panjang. Program ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin. Data menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH konsisten dipertahankan sebanyak 10 juta jiwa dari tahun 2020 hingga 2024, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp20,4 triliun pada tahun 2024. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024 & Muluk, F. A., & Rahmawati, I. D. 2024).

PKH secara substantif bertujuan untuk: (a) meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM; dan (d) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Dengan skema bersyarat ini, PKH tidak semata-mata memberikan bantuan tunai, melainkan juga mendorong investasi sumber daya manusia dalam keluarga miskin secara sistematis sebagai upaya memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi. (Jurnal STIA Bengkulu, 2024). Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa PKH memberikan dampak positif yang nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat keterbatasan mendasar: dampak penurunan kemiskinan yang ditimbulkan PKH bersifat sementara apabila tidak diiringi dengan upaya pemberdayaan yang mendorong kemandirian KPM. Oleh karena itu, PKH semata-mata sebagai program transfer tunai dinilai belum cukup tanpa disertai edukasi dan pendampingan yang intensif dan terstruktur kepada para penerima manfaat. Aulia (2024) secara tegas menyatakan bahwa tanpa komponen pemberdayaan yang kuat, program bantuan sosial berisiko menciptakan dependensi jangka panjang alih-alih mendorong kemandirian yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi PKH secara nasional adalah munculnya budaya ketergantungan pada bantuan sosial di kalangan sebagian KPM. Setiawan (2022) menyatakan bahwa budaya ketergantungan ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat graduasi KPM PKH. Lindayasos (2024) menambahkan bahwa ketergantungan tersebut semakin menguat ketika program tidak disertai komponen pemberdayaan yang memadai, sehingga KPM tidak memiliki bekal yang cukup untuk hidup mandiri pascaprogram. Fenomena ini menegaskan urgensi dilakukannya edukasi yang

e-ISSN: 3089-798X

sistematis untuk mengubah cara pandang penerima manfaat terhadap hakikat PKH sebagai jembatan menuju kemandirian, bukan sandaran permanen.

Menjawab tantangan tersebut, edukasi dan pendampingan sosial yang intensif diyakini menjadi kunci keberhasilan PKH dalam mendorong kemandirian KPM. Hasil evaluasi program pelatihan pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemahaman peserta meningkat dari skor pre-test 60,6 menjadi 84,8 pada post-test, mencerminkan peningkatan pemahaman keuangan sebesar 40 persen (Kismytiadara et al., 2024). Iqbal dan Marto (2024) menegaskan bahwa pendekatan pelatihan praktis yang berkelanjutan secara konsisten menghasilkan kapasitas yang lebih besar dibandingkan sosialisasi konvensional yang bersifat satu arah. Temuan tersebut memperkuat keyakinan bahwa edukasi dan pendampingan yang terstruktur merupakan investasi strategis dalam mencapai tujuan PKH secara berkelanjutan.

Merespons kondisi tersebut, Kelompok 1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, pada 29 Maret hingga 4 April 2026. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar PKH, kriteria penerima manfaat, hak dan kewajiban KPM, prosedur pencairan, orientasi jangka panjang program, serta peran masyarakat dalam pengawasan. Evaluasi pascakegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta memahami materi yang disampaikan. (Andaniyati et al., 2021; Pariyanti, 2023).

Optimalisasi PKH tidak cukup bertumpu pada mekanisme penyaluran bantuan tunai semata, melainkan harus didukung edukasi berkelanjutan dan pendampingan sosial yang berkualitas. Pengalaman di Nagari Pilubang membuktikan bahwa penyampaian informasi yang tepat mampu mendorong masyarakat menginternalisasi PKH sebagai program pemberdayaan, bukan sekadar mekanisme distribusi tunai. Atas dasar itu, artikel ini bertujuan mendokumentasikan, menganalisis, dan merumuskan rekomendasi strategis terkait optimalisasi PKH melalui edukasi dan pendampingan terstruktur sebagai kontribusi akademis bagi pengembangan kebijakan perlindungan sosial di tingkat lokal.

METODE

Kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan dan menganalisis proses implementasi edukasi dan pendampingan PKH di Nagari Pilubang secara holistik, bukan sekadar mengukur hubungan statistik antar variabel.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu: (1) observasi partisipatif selama kegiatan sosialisasi berlangsung di Nagari Pilubang pada 29 Maret hingga 4 April 2026; (2) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang meliputi pendamping PKH, aparatur nagari, tokoh masyarakat, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM); serta (3) dokumentasi berupa catatan lapangan, foto kegiatan, dan hasil kuesioner evaluasi pascakegiatan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pelaksanaan PKH di wilayah tersebut.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari lapangan; (2) penyajian data, yaitu penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau bagan guna memudahkan penarikan kesimpulan; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses pemaknaan terhadap data yang telah disajikan dan pengujian keabsahannya. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Kondisi Awal KPM di Nagari Pilubang

Sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, kondisi pemahaman masyarakat khususnya para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih berada pada taraf yang sangat terbatas. Dari hasil

e-ISSN: 3089-798X

observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh tim mahasiswa, mayoritas warga memandang PKH semata-mata sebagai bantuan tunai bulanan yang dapat digunakan secara bebas tanpa kewajiban tertentu. Persepsi ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar terhadap filosofi program, yakni bahwa PKH sesungguhnya dirancang sebagai jembatan sementara menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi intensif sebelumnya di wilayah yang relatif terpencil, di mana akses terhadap informasi digital masih sangat terbatas bagi sebagian besar penduduk.

Keterbatasan pemahaman tersebut pada gilirannya melahirkan pola pemanfaatan dana yang kurang optimal. Banyak KPM yang ditemui dalam wawancara mengaku menggunakan seluruh dana PKH untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, seperti pembelian makanan, pakaian, hingga keperluan sosial seperti arisan dan pesta keluarga, tanpa menyisihkan sebagian untuk investasi atau tabungan jangka panjang. Pola ini tidak hanya menghambat tercapainya tujuan program, tetapi juga melanggengkan siklus ketergantungan yang berkepanjangan, di mana meskipun bantuan telah berjalan selama bertahun-tahun, kondisi ekonomi keluarga tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Lebih mengkhawatirkan, sebagian warga bahkan mengaku merasa enggan untuk "lulus" dari program ini karena khawatir kehilangan sumber pendapatan yang dianggap tetap.

Budaya ketergantungan ini sejalan dengan temuan Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa dependency mindset merupakan salah satu faktor terbesar yang memperlambat proses graduasi KPM PKH secara nasional. Fenomena tersebut terjadi karena program bantuan sosial yang tidak disertai edukasi yang memadai cenderung dipersepsi sebagai hak permanen, bukan sebagai sarana sementara yang dirancang untuk mendorong perubahan perilaku. Dalam konteks Nagari Pilubang, persepsi ini semakin menguat akibat rendahnya tingkat pendidikan formal KPM yang mayoritas hanya lulusan SD atau SMP sehingga kemampuan mereka dalam memahami konsep-konsep seperti manajemen keuangan rumah tangga atau perencanaan jangka panjang sangat terbatas. Hal ini menegaskan bahwa intervensi edukatif yang kontekstual dan humanis merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Tantangan struktural di lapangan semakin memperparah kondisi tersebut. Lokasi Nagari Pilubang yang berada di kawasan perbukitan menjadikan akses transportasi sebagai hambatan utama, terutama saat musim hujan yang kerap mengakibatkan jalan licin dan banjir kecil. Rasio pendamping sosial yang masih sangat tidak ideal—sekitar 1:250 di Kabupaten Padang Pariaman—menyebabkan bimbingan individual terhadap setiap KPM sulit dilakukan secara optimal. Di sisi lain, adanya kecemburuan sosial dari warga yang tidak terdaftar sebagai KPM sesekali memicu konflik horizontal di tingkat RT atau RW, yang semakin memperberat beban kerja pendamping sosial. Secara keseluruhan, situasi pra-sosialisasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan intervensi edukatif yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, agar PKH benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar mekanisme distribusi tunai yang bersifat karitatif.

Kondisi yang tergambar di Nagari Pilubang sesungguhnya bukan fenomena yang terisolasi, melainkan merupakan cerminan dari persoalan sistemik yang dihadapi PKH di banyak wilayah perdesaan Indonesia. Aulia (2024) menegaskan bahwa dampak penurunan kemiskinan yang dihasilkan PKH cenderung bersifat sementara apabila tidak diimbangi dengan upaya pemberdayaan yang mendorong kemandirian KPM secara nyata. Oleh karena itu, sebelum kegiatan sosialisasi digelar, tim mahasiswa terlebih dahulu melakukan pemetaan mendalam terhadap kondisi lapangan melalui wawancara dengan pendamping PKH setempat, perangkat nagari, dan sejumlah KPM terpilih. Pemetaan ini menjadi fondasi penting dalam merancang materi dan metode sosialisasi yang tepat sasaran, relevan secara kontekstual, dan mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat

Pelaksanaan Edukasi dan Pendampingan

Kegiatan sosialisasi yang kami gelar dari tanggal 29 Maret hingga 4 April 2026 menjadi momen krusial untuk mengatasi gap tersebut. Puncaknya berlangsung pada Kamis, 2 April 2026, di Kantor Wali Nagari Pilubang, di mana kami sebagai tim mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang, yaitu Amanda Hendrilia Putri, Andri Syahputra, Annisa Fitri dan, Lusyiana Andhica, bertindak sebagai pemateri utama. Acara ini didukung penuh oleh Bapak Wali Nagari beserta perangkat nagarinya, serta dihadiri oleh puluhan ibu-ibu dari kalangan KPM yang datang dengan semangat tinggi meski harus menempuh jarak dari rumah masing-masing.

Materi yang kami sampaikan dirancang agar mudah dicerna dan langsung aplikatif dalam kehidupan sehari-hari warga. Pertama, kami memulai dengan pengantar lengkap tentang apa itu PKH:

e-ISSN: 3089-798X

sebuah program pemerintah pusat yang bertujuan memerangi kemiskinan struktural melalui bantuan kondisional, di mana dana tunai hanya diberikan jika keluarga memenuhi komitmen seperti menyekolahkan anak secara rutin, membawa balita ke posyandu untuk imunisasi dan pemantauan gizi, serta berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan dari pendamping sosial. Kami tekankan bahwa PKH bukanlah bantuan abadi, melainkan "batu loncatan" sementara seperti tangga yang membantu keluarga naik dari jurang kemiskinan menuju tanah datar kemandirian. Kami jelaskan kriteria penerima, proses verifikasi data melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), beserta hak dan kewajiban secara rinci, termasuk sanksi pemangkasan bantuan jika pelanggaran terjadi berulang kali.

Selanjutnya, kami bahas strategi pengelolaan keuangan rumah tangga dengan konsep "uang dingin", yang menjadi highlight favorit para peserta. Kami ajak mereka membayangkan: setiap menerima bantuan PKH katakanlah Rp1,2 juta per triwulan langsung sisihkan minimal Rp10.000 hingga Rp50.000 sebagai tabungan khusus yang "didiamkan" di celengan atau rekening sederhana, tidak boleh disentuh untuk belanja harian seperti beras, minyak, atau baju baru. Setelah 3-6 bulan, dana itu bisa berkembang menjadi modal usaha kecil-kecilan, misalnya berjualan gorengan, kue tradisional seperti nagari (rendang mini atau tape singkong), atau budidaya ayam kampung di pekarangan rumah. Kami hitungkan secara sederhana: Rp10.000 sehari saja bisa jadi Rp300.000 sebulan, dan setahun kemudian sudah cukup untuk beli peralatan jualan atau bibit tanaman. Konsep ini kami ilustrasikan dengan cerita sukses warga tetangga di Sumatera Barat yang berhasil mandiri berkat pendekatan serupa.

Bagian penting lainnya adalah pendidikan anak sebagai investasi masa depan. PKH memang menanggung biaya sekolah hingga SMA, tapi kami mengingatkan bahwa untuk kuliah atau vokasi, orang tua harus mulai menabung sejak dini. Kami membagikan tips praktis: alokasikan 20% dari bantuan untuk buku pelajaran, seragam cadangan, dan les tambahan; pastikan anak hadir di sekolah tepat waktu; serta libatkan mereka dalam kegiatan nagari seperti Pramuka atau kelompok belajar. Kami juga menyentuh isu literasi digital, mengajari cara cek status PKH via aplikasi Cek Bansos atau website Kementerian Sosial, serta bahaya pinjol ilegal yang sering mengintai keluarga miskin. Materi ditutup dengan visi "Keluarga Berdaya, Masyarakat Sejahtera", di mana setiap KPM diajak merencanakan "rencana keluar" dari PKH dalam 2-3 tahun ke depan melalui usaha sampingan atau skill training gratis dari dinas terkait.

Metode penyampaian kami buat seinteraktif mungkin agar tidak membosankan. Kami menggunakan slide PowerPoint berwarna cerah dengan gambar sederhana seperti ilustrasi keluarga menabung di celengan atau anak-anak tersenyum di kelas diproyeksikan lewat laptop dan layar besar yang dipinjam dari kantor nagari. Presentasi dibagi jadi segmen 20-30 menit, diikuti sesi diskusi partisipatif di mana peserta boleh bertanya atau berbagi pengalaman. Misalnya, seorang ibu bertanya, "Kalau anak malas sekolah gimana, Bu?", lalu kami jawab bareng bagi sambil gelar kuis ringan dengan hadiah sabun cuci atau minyak goreng untuk pemenang. Ada juga role-playing singkat: peserta simulasi bagi-bagi uang bantuan ke "kebutuhan harian" vs "tabungan usaha", yang bikin suasana ramai dan penuh tawa. Pendekatan ini membuat materi terasa dekat, seperti ngobrol santai di warung kopi, bukan kuliah formal.

Respons peserta sungguh menggembirakan dan melebihi harapan. Ibu-ibu KPM datang dengan membawa anak-anak mereka agar ikut mendengar. Mereka mendengarkan dengan seksama, mata berbinar saat kami ceritakan kisah sukses, dan aktif bertanya ada yang curhat soal kesulitan nabung karena utang tetangga, ada pula yang antusias janji coba "uang dingin" mulai bulan depan. Di akhir sesi, hampir semua mengacungkan jempol dan berfoto bareng, sambil bilang "Terima kasih, Nak, sekarang baru ngerti PKH buat apa!" Tidak ada protes atau ketidakhadiran signifikan; justru dukungan Bapak Wali Nagari yang membuka acara dengan sambutan hangat membuat semua merasa dihargai. Evaluasi pasca-acara menunjukkan peningkatan pemahaman hingga 80%, dengan peserta merasa lebih percaya diri untuk kelola bantuan secara bijak. Kegiatan ini bukan hanya transfer ilmu, tapi juga membangun ikatan emosional, di mana warga merasa didengar dan diberdayakan sebagai subjek utama perubahan di nagari mereka sendiri.

Hasil Peningkatan Pemahaman KPM

Evaluasi yang dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test memberikan gambaran yang sangat menggembirakan tentang efektivitas kegiatan sosialisasi. Sebelum sosialisasi, sebagian besar peserta hanya mampu menjawab dengan benar kurang dari 50 persen pertanyaan terkait mekanisme PKH, hak dan kewajiban KPM, prosedur pencairan bantuan, serta tujuan jangka panjang program.

e-ISSN: 3089-798X

Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, persentase peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar meningkat rata-rata hingga 80 persen, menandai lonjakan pemahaman yang sangat signifikan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test Peserta Sosialisasi PKH di Nagari Pilubang Tahun 2026

Aspek yang Diukur	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep dasar PKH	48	85	+77,1
Pengetahuan hak dan kewajiban KPM	42	83	+97,6
Prosedur pencairan dan administrasi	35	80	+128,6
Tujuan jangka panjang dan kemandirian	38	78	+105,3
Pengelolaan keuangan keluarga	30	75	+150,0
Literasi digital dan akses layanan	25	72	+188,0
Rata-rata keseluruhan	36,3	78,8	+117,1

Sumber: Data Primer Kegiatan Sosialisasi PKH Nagari Pilubang, 2026

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa peningkatan pemahaman terjadi secara merata pada seluruh aspek yang diukur, meskipun dengan besaran yang bervariasi. Peningkatan tertinggi dicapai pada aspek literasi digital dan akses layanan (188,0%) serta pengelolaan keuangan keluarga (150,0%), yang sebelumnya hampir tidak pernah mendapat perhatian dalam sosialisasi PKH di wilayah tersebut. Capaian ini sangat signifikan mengingat kedua aspek tersebut merupakan kompetensi kunci yang menentukan kemampuan KPM untuk mengelola bantuan secara mandiri dan mengakses sumber daya publik tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada pendamping sosial. Sementara itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban KPM meningkat hampir dua kali lipat (97,6%), menunjukkan bahwa informasi tersebut berhasil menjangkau kelompok sasaran yang sebelumnya benar-benar minim pengetahuan mengenai ketentuan program.

Temuan ini selaras dengan penelitian Kismytiadara et al. (2024) yang mendokumentasikan peningkatan pemahaman rata-rata peserta sebesar 40 persen melalui program pelatihan keuangan bagi KPM, meskipun capaian di Nagari Pilubang jauh melampaui angka tersebut berkat pendekatan yang lebih kontekstual dan interaktif. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain keterlibatan langsung tim mahasiswa yang berusia relatif muda sehingga lebih mudah membangun kedekatan dengan peserta, penggunaan analogi dan contoh kasus yang sangat relevan dengan keseharian warga, serta suasana kegiatan yang dialogis dan tidak menghakimi. Iqbal dan Marto (2024) menegaskan bahwa pendekatan pelatihan praktis yang bersifat berkelanjutan secara konsisten menghasilkan peningkatan kapasitas yang lebih besar dibandingkan sosialisasi konvensional yang bersifat satu arah dan sesaat. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini tidak sekadar mencerminkan keberhasilan satu sesi sosialisasi, melainkan menjadi bukti empiris bahwa metode yang tepat dapat mengakselerasi perubahan pemahaman secara dramatis bahkan dalam rentang waktu yang singkat.

Aspek yang patut mendapat perhatian khusus adalah capaian pada dimensi pengelolaan keuangan keluarga, yang mencatatkan peningkatan sebesar 150 persen dari hanya 30 persen pada pre-test menjadi 75 persen pada post-test. Angka pre-test yang sangat rendah ini mengonfirmasi temuan wawancara awal bahwa literasi keuangan merupakan salah satu kelemahan paling fundamental di kalangan KPM Nagari Pilubang, yang selama ini tidak pernah secara sistematis ditangani melalui program pendampingan PKH yang ada. Capaian post-test sebesar 75 persen, meskipun belum ideal, menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari satu minggu, peserta telah mampu menyerap konsep-konsep dasar manajemen keuangan rumah tangga yang sebelumnya sama sekali asing bagi mereka. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa defisit literasi keuangan di kalangan KPM bukanlah persoalan kapasitas kognitif, melainkan persoalan akses terhadap pendidikan yang relevan dan berkualitas yang selama ini belum tersedia secara merata.

Secara kualitatif, antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menjadi indikator tak tertulis yang tidak kalah penting dari data kuantitatif. Ibu-ibu KPM hadir membawa serta anak-anak mereka, aktif mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman keseharian, dan terlibat dalam simulasi pengelolaan keuangan dengan penuh semangat. Di akhir sesi, hampir seluruh peserta menyatakan bahwa mereka akhirnya memahami hakikat dan tujuan PKH yang sesungguhnya sebuah pencapaian kognitif yang jauh lebih bermakna daripada sekadar angka persentase dalam lembar evaluasi. Beberapa peserta bahkan secara spontan berkomitmen untuk mulai mempraktikkan konsep "uang dingin" mulai bulan berikutnya,

e-ISSN: 3089-798X

mencerminkan bahwa perubahan pemahaman telah melampaui tataran kognitif dan mulai menyentuh dimensi niat perilaku (behavioral intention) yang merupakan prasyarat bagi perubahan tindakan nyata..

Analisis Dampak terhadap Kemandirian dan Pengurangan Ketergantungan

Temuan dari kegiatan sosialisasi di Nagari Pilubang secara konsisten mempertegas bahwa intervensi edukasi dan pendampingan yang terstruktur memiliki potensi transformatif dalam menggeser orientasi KPM dari pola pikir ketergantungan (dependency mindset) menuju pola pikir pemberdayaan (empowerment mindset). Pergeseran perspektif ini bukan sekadar perubahan pengetahuan faktual, melainkan merupakan rekonstruksi cara pandang yang lebih mendasar tentang posisi dan peran KPM dalam kerangka program PKH. Secara teoritis, temuan ini konsisten dengan kerangka pemberdayaan masyarakat yang menekankan bahwa pemberdayaan sejati tidak hanya menyangkut dimensi material berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga dimensi kognitif berupa peningkatan kesadaran, kapasitas analitis, dan kemampuan pengambilan keputusan secara mandiri. Dalam konteks PKH, dimensi kognitif inilah yang selama ini paling banyak terabaikan, sehingga program cenderung hanya berhasil pada dimensi jangka pendek peningkatan konsumsi namun belum optimal pada dimensi jangka panjang berupa kemandirian ekonomi keluarga.

Pergeseran dari dependency mindset menuju empowerment mindset yang teramati di Nagari Pilubang dapat dipahami melalui perspektif teori pemberdayaan Rappaport (1987) yang menyatakan bahwa empowerment terjadi ketika individu memperoleh kontrol atas keputusan dan sumber daya yang memengaruhi kehidupan mereka. Sebelum sosialisasi, KPM cenderung menempatkan diri sebagai objek pasif penerima bantuan; setelah sosialisasi, mereka mulai memahami diri sebagai subjek aktif yang memiliki hak sekaligus kewajiban dalam kerangka program. Perubahan perspektif ini dimanifestasikan dalam kesediaan peserta untuk merancang rencana keluar dari PKH, yang dalam literatur program disebut sebagai "graduasi terencana"sebuah kondisi ideal yang justru kerap dihindarkan oleh KPM yang masih terjebak dalam dependency mindset. Keberhasilan sosialisasi dalam memicu perubahan perspektif ini, meskipun baru pada tahap niat (intention), merupakan capaian yang secara teoritis sangat signifikan karena perubahan perilaku hampir selalu didahului oleh perubahan cara pandang.

Penggunaan konsep "uang dingin" dalam sosialisasi terbukti menjadi inovasi pedagogis yang sangat efektif karena berhasil menyederhanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang abstrak menjadi tindakan konkret yang dapat langsung dipraktikkan oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini secara cerdas menggabungkan nilai-nilai budaya yang sudah ada seperti tradisi menabung di celengan yang familiar bagi warga pedesaan dengan prinsip-prinsip keuangan modern yang lebih terstruktur. Pariyanti (2023) mengonfirmasi bahwa literasi keuangan yang dikemas dalam bahasa sehari-hari dan disajikan melalui contoh-contoh yang dekat dengan pengalaman hidup KPM jauh lebih efektif mengubah perilaku finansial dibandingkan penyuluhan yang menggunakan terminologi teknis dan pendekatan top-down. Lebih dari itu, konsep "uang dingin" juga secara implisit mengajarkan prinsip delayed gratification kemampuan menunda kepuasan sesaat demi manfaat jangka panjang yang lebih besar yang merupakan salah satu kompetensi psikologis paling krusial dalam membangun kemandirian ekonomi jangka panjang.

Dimensi sosial dari kegiatan ini juga tidak dapat diabaikan dalam analisis komprehensif dampaknya. Interaksi langsung yang terjalin antara tim mahasiswa, pendamping PKH, perangkat nagari, dan KPM selama seminggu penuh menciptakan modal sosial yang sangat berharga berupa jaringan komunikasi baru dan rasa saling percaya yang dapat menjadi fondasi bagi pendampingan berkelanjutan pascakegiatan. Andaniyati et al. (2021) menegaskan bahwa efektivitas Family Development Session (FDS) sebagai komponen pemberdayaan PKH sangat bergantung pada kualitas hubungan interpersonal antara pendamping dan KPM, yang hanya dapat dibangun melalui interaksi yang intens, konsisten, dan saling menghargai. Dalam konteks Nagari Pilubang, kehadiran tim mahasiswa yang bersikap setara dan tidak menggurui berhasil mencairkan jarak sosial yang kerap menjadi penghalang komunikasi efektif antara program pemerintah dengan masyarakat penerima manfaatnya. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bahwa investasi dalam membangun relasi kepercayaan sebelum menyampaikan materi substantif merupakan prasyarat yang tidak boleh dilewatkan dalam desain program pendampingan.

Kegiatan sosialisasi di Nagari Pilubang juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya pendekatan yang berorientasi pada kekuatan (strength-based approach) dalam program pemberdayaan, sebagai lawan dari pendekatan yang terlalu berfokus pada defisit dan kekurangan penerima manfaat. Dengan mengedepankan kemampuan dan potensi yang sudah dimiliki oleh KPM seperti keterampilan

e-ISSN: 3089-798X

memasak untuk usaha kuliner, atau kebiasaan bercocok tanam untuk agribisnis rumahan tim mahasiswa berhasil membantu peserta melihat diri mereka bukan sebagai pihak yang lemah dan membutuhkan belas kasihan, melainkan sebagai individu berdaya yang sedang dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Pendekatan ini terbukti jauh lebih efektif dalam membangun motivasi intrinsik untuk berubah, yang menurut Kismytiadara et al. (2024) merupakan kunci keberlanjutan perubahan perilaku pascaprogram. Temuan ini memperkuat rekomendasi bahwa desain program pemberdayaan KPM PKH ke depan perlu lebih banyak mengintegrasikan metodologi strength-based approach dalam kurikulum dan metode pendampingannya.

Namun demikian, analisis yang jujur juga mengharuskan pengakuan atas sejumlah keterbatasan dan tantangan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu rangkaian kegiatan sosialisasi, betapa pun efektifnya. Rasio pendamping yang masih sangat timpang (1:250), keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya pendidikan formal KPM, serta kondisi geografis yang tidak menguntungkan merupakan kendala sistemik yang memerlukan intervensi kebijakan yang jauh lebih komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah. Kismytiadara et al. (2024) merekomendasikan bahwa program pemberdayaan KPM perlu diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kasus yang komprehensif, di mana setiap KPM mendapatkan rencana pemberdayaan individual yang disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, dan potensi masing-masing. Pengalaman di Nagari Pilubang membuktikan bahwa fondasi perubahan sikap dan pemahaman telah berhasil diletakkan; tantangan ke depan adalah memastikan bahwa fondasi ini diperkuat melalui pendampingan yang berkelanjutan, konsisten, dan didukung oleh sumber daya yang memadai agar transformasi dari penerima manfaat menuju individu yang berdaya dan mandiri dapat benar-benar terwujud secara permanen.

Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi PKH di Nagari Pilubang

Keberhasilan kegiatan sosialisasi PKH di Nagari Pilubang tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang secara sinergis memperkuat efektivitas intervensi yang dilakukan. Pertama, dukungan kelembagaan yang kuat dari pemerintah nagari, yang diwujudkan melalui keterlibatan aktif Wali Nagari dalam membuka dan memfasilitasi kegiatan, memberikan legitimasi sosial yang sangat berarti bagi program ini. Dalam konteks masyarakat nagari yang masih sangat menghormati hierarki sosial dan kelembagaan adat, kehadiran dan dukungan Wali Nagari secara langsung meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga, terutama KPM yang sebelumnya masih ragu untuk hadir karena khawatir agenda kegiatan akan membebani atau mengancam status penerima bantuan mereka. Legitimasi kelembagaan ini, menurut Ibrahim et al. (2023), merupakan salah satu prasyarat keberhasilan program intervensi sosial di tingkat komunitas yang kerap diabaikan dalam desain program pemerintah yang bersifat top-down.

Kedua, pendekatan komunikasi yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan peserta terbukti menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan. Tim mahasiswa secara konsisten menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, menghindari jargon teknis birokrasi, serta mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal Minangkabau dalam penyampaian materi. Misalnya, konsep gotong royong dan saling tolong (saliang tolong-menolong) yang merupakan nilai inti masyarakat Minangkabau dipadukan dengan prinsip pengelolaan keuangan bersama, seperti mendorong KPM untuk membentuk kelompok tabungan informal (arisan produktif) sebagai alternatif dari kebiasaan arisan konsumtif yang sudah ada. Integrasi nilai-nilai lokal ini tidak hanya mempermudah pemahaman, tetapi juga memperkuat relevansi materi dengan konteks kehidupan nyata peserta, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya angka penyerapan materi yang tercermin dalam hasil post-test. Sabarisman et al. (2024) mengonfirmasi bahwa program pemberdayaan yang mengintegrasikan kearifan lokal dan modal sosial komunitas secara konsisten menghasilkan dampak yang lebih bertahan lama dibandingkan program yang mengabaikan konteks budaya setempat.

Ketiga, motivasi intrinsik peserta yang tinggi menjadi faktor pendukung yang tidak dapat diabaikan. Mayoritas KPM yang hadir ternyata memiliki keinginan yang kuat untuk keluar dari kondisi kemiskinan, meskipun selama ini tidak memiliki pengetahuan dan panduan yang memadai tentang langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Kegiatan sosialisasi menjadi momentum penting yang mempertemukan motivasi yang sudah ada dalam diri KPM dengan pengetahuan dan strategi praktis yang mereka butuhkan. Rahma dan Ikhwan (2024) menegaskan bahwa motivasi untuk melakukan graduasi mandiri sesungguhnya telah dimiliki oleh banyak KPM, namun seringkali tidak teraktualisasi karena tidak adanya pendampingan yang membantu mereka menerjemahkan motivasi tersebut ke dalam

e-ISSN: 3089-798X

rencana tindakan yang konkret dan terukur. Temuan ini memperkuat argumen bahwa permasalahan utama KPM bukan terletak pada kurangnya motivasi, melainkan pada kesenjangan antara motivasi dan kapasitas kesenjangan yang dapat dijembatani secara efektif melalui edukasi dan pendampingan yang berkualitas.

Di sisi lain, sejumlah faktor penghambat juga teridentifikasi selama pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan waktu menjadi hambatan utama yang paling dirasakan: tujuh hari pelaksanaan, dengan puncak kegiatan hanya berlangsung satu hari penuh, dinilai belum mencukupi untuk menjamin internalisasi nilai dan perubahan perilaku yang mendalam dan berkelanjutan. Perubahan perilaku finansial, khususnya, merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan pengulangan, praktik langsung, dan umpan balik yang konsisten kondisi yang sulit dipenuhi dalam satu sesi sosialisasi sesingkat ini. Selain itu, heterogenitas tingkat pendidikan peserta menciptakan tantangan pedagogis tersendiri: sementara sebagian peserta dengan pendidikan SMP dapat mengikuti materi dengan cepat, peserta yang hanya berpendidikan SD atau bahkan tidak pernah bersekolah memerlukan penjelasan yang jauh lebih intensif dan berulang untuk materi yang sama. Kondisi ini menegaskan perlunya diferensiasi pendekatan dalam desain program sosialisasi PKH yang lebih komprehensif ke depannya.

Hambatan struktural lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendukung. Minimnya akses internet di Nagari Pilubang menjadi kendala serius dalam upaya mendorong literasi digital KPM, terutama untuk mengakses informasi PKH melalui aplikasi Cek Bansos. Meskipun tim mahasiswa telah memberikan panduan langkah demi langkah mengenai penggunaan aplikasi tersebut, banyak peserta yang tidak memiliki smartphone atau tidak berlangganan paket data, sehingga pengetahuan yang diperoleh sulit diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan digital yang masih sangat nyata di wilayah perdesaan Indonesia, dan menegaskan bahwa program literasi digital untuk KPM harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur digital yang merata hingga ke tingkat nagari. Muluk dan Rahmawati (2024) menyatakan bahwa efektivitas PKH sebagai program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, yang mencakup tidak hanya infrastruktur fisik tetapi juga infrastruktur digital dan informasi.



Gambar.1 Dokumentasi Kegiatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Wali Nagari Pilubang beserta perangkat nagari atas izin dan dukungan yang diberikan, serta kepada pendamping PKH setempat atas bantuannya dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atas partisipasi aktif dan respons positif selama proses pengumpulan data, kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan akademik, serta kepada seluruh anggota kelompok atas kerja sama dan kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan artikel ini.

Penulis menyadari artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pengembangan

e-ISSN: 3089-798X

ilmu pengetahuan dan praktik pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, melalui kegiatan edukasi dan pendampingan yang terstruktur terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mengubah orientasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara signifikan. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan rata-rata peningkatan pemahaman sebesar 117,1 persen, dengan seluruh aspek yang diukur mengalami kenaikan yang bermakna. Temuan ini mempertegas bahwa PKH tidak dapat berjalan optimal hanya dengan mekanisme transfer tunai bersyarat, melainkan membutuhkan komponen edukasi dan pendampingan yang intensif sebagai pilar yang tidak terpisahkan.

Pendekatan sosialisasi partisipatif yang diterapkan—yang mengintegrasikan penyampaian materi berbasis media visual, diskusi dua arah, simulasi, dan kuis interaktif—terbukti mampu menjangkau kelompok sasaran dengan tingkat pendidikan formal yang beragam. Konsep pengelolaan keuangan yang disederhanakan dalam bahasa sehari-hari seperti "uang dingin" berhasil mengubah perspektif KPM terhadap hakikat PKH: dari sekadar "rezeki tambahan" menjadi "batu loncatan" menuju kemandirian ekonomi.

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan terkait. Pertama, kegiatan sosialisasi dan edukasi PKH perlu dijadwalkan secara rutin, minimal satu kali dalam setiap siklus penyaluran bantuan. Kedua, rasio pendamping sosial perlu dioptimalkan dengan penambahan tenaga pendamping atau pengembangan kader desa terlatih. Ketiga, komponen literasi keuangan dan literasi digital perlu diintegrasikan secara formal ke dalam kurikulum Family Development Session (FDS) PKH. Keempat, perlu dikembangkan mekanisme manajemen kasus individual agar setiap KPM mendapatkan rencana pemberdayaan yang disesuaikan dengan potensi keluarganya, sebagai langkah konkret menuju graduasi mandiri yang bermartabat.

DAFTAR REFERENSI

Andaniyati, N. S., Destiningsih, R., & Septiani, Y. (2021). Pengaruh efektivitas kegiatan Family Development Session (FDS) sebagai upaya pemberdayaan terhadap kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif, 6(2), 359–370.

Aulia, D. R. N. (2024). Program Keluarga Harapan dan pentingnya membangun kemandirian ekonomi masyarakat pra sejahtera. The Indonesian Institute.

Badan Pusat Statistik. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia September 2024. BPS RI.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2025). Profil kemiskinan Provinsi Sumatera Barat September 2024.

Ibrahim, N., Mahmud, R., & Wantu, S. M. (2023). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota. PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial, 23(1).

Iqbal, M., & Marto, H. (2024). Membangun kemandirian finansial penerima PKH melalui pelatihan pengelolaan keuangan yang praktis dan berkelanjutan. RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Program Keluarga Harapan (PKH).

Kismytiadara., Purnamasari, I., & Salbiah, E. (2024). Peran pendamping sosial PKH dalam mendorong graduasi mandiri KPM. Karimah Tauhid, 3(9).

Lindayasos. (2024). Menguak hambatan graduasi: Dinamika PKH pada KPM. Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, 1(2).

Muluk, F. A., & Rahmawati, I. D. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi garis kemiskinan. Jurnal Media Akademik, 2(7).

Pariyanti, E. (2023). Peningkatan literasi dan pengelolaan keuangan keluarga pada ibu rumah tangga penerima bantuan PKH. SOCIRCLE: Journal of Social Community Service, 2(1), 1–8.

Rahma, P., & Ikhwan, I. (2024). Motivasi KPM PKH melakukan graduasi mandiri. Perspektif: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Sabarisman, M., Sulubere, M. B., & Arifin, J. (2024). Kontribusi model kewirausahaan sosial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan jaringan sosial KPM. Sosio Konsepsia, 14(1), 65–80.

e-ISSN: 3089-798X

Setiawan, B. (2022). Budaya ketergantungan pada bantuan sosial di Indonesia: Studi kasus PKH. Jurnal Sosiologi dan Kebijakan Sosial, 5(1), 45–62.

Jurnal STIA Bengkulu. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan. Jurnal STIA Bengkulu, 10(2), 127–136.